

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

UMKM di Indonesia sampai saat ini mempunyai peranan yang besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan pendapatan nasional, hal ini dikarenakan dari UMKM ini dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Oleh karena itu UMKM perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah sehingga dapat berkembang dan dapat bersaing dengan industri-industri besar yang ada, karena dengan makin berkembangnya UMKM yang ada akan semakin banyak menyerap tenaga kerja dan memajukan sektor koperasi.

Keberadaan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap upaya penanggulangan masalah-masalah yang dihadapi seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan segala aspek yang tidak baik. Peranan UMKM di Indonesia yang dikaitkan dengan pemerintah harus dapat mengurangi tingkat pengangguran yang semakin bertambah disetiap tahunnya, menanggulangi kemiskinan dengan membantu masyarakat yang kurang mampu dan pemerataan pendapatan yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam keuangan.

Keberadaan UMKM selama ini telah menjadi sumber kehidupan dari sebagian besar rakyat Indonesia. Yang menjadikan UMKM terus bertahan disaat

krisis ekonomi adalah karena, pertama, sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah. Kedua, sebagian besar UMKM menggunakan modal sendiri tanpa bantuan modal dari pemerintah ataupun bank sehingga ketika terjadi krisis di sektor perbankan dan suku bunga bank naik, maka tidak mempengaruhi kinerja dari UMKM itu sendiri. Ketiga, krisis ekonomi yang berkepanjangan terjadi kasus pemberhentian tenaga kerja di sektor formal.

Sulitnya koperasi dan UMKM berkembangnya di sebabkan beberapa faktor seperti terbatasnya modal kerja, sulit bersaing dengan perusahaan besar, sulit memenangkan lobi bisnis, teknologi yang sederhana, kualitas barang yang kurang, inovasi yang rendah, dll.

Berkaitan dengan modal, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dalam hal ini melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupaya meningkatkan dan memberdayakan ekonomi rakyat utamanya industri kecil dan menengah yang ada di Provinsi Sumatra Barat melalui bantuan dana bergulir. Pelaksanaan kegiatan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk dipinjamkan kepada pengusaha industri mikro, kecil dan menengah.

Pemberian pinjaman permodalan dengan sistem bergulir ini dimaksudkan agar penerimaan angsuran pinjaman nantinya dapat digulirkan atau dipinjamkan kembali baik kepada penerima pinjaman yang sudah lunas maupun kepada

pengusaha industri mikro, kecil dan menengah lainnya. Sehingga dana yang awalnya berasal dari APBD tersebut dapat berkembang. Agar dana pinjaman yang disalurkan tepat sasaran, sebelum menentukan penerima pinjaman dilakukan survei terhadap calon peminjam yang dilakukan oleh tim seleksi dana bergulir dibantu oleh tim pendamping dana bergulir yang ada di Kabupaten/Kota. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi perusahaan secara langsung. Dari hasil survei tersebut diadakan analisa untuk mengetahui kelayakan usaha yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan nama penerima pinjaman dana bergulir, selain syarat-syarat administrasi lainnya.

Berdasarkan kasus diatas, maka penulis mencoba membahas masalah yang menyangkut sektor koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pembahasan mengenai Bantuan Dana Penguatan modal/Perkreditan Kepada Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah yang mana semuanya penulis bahas dalam pelaksanaan magang dengan mengangkat judul “**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR (Bantuan Penguatan Modal) PADA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATERA BARAT**”.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam Analisis Pengelolaan Dana Bergulir (Bantuan Penguatan Modal) Pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Bagaimana proses pengelolaan dana bergulir (bantuan penguatan modal)?
2. Seberapa besar dampak atau manfaat dari dana bergulir pada perkembangan UMKM ?

1.3 Tujuan Magang

Magang merupakan suatu mata kuliah wajib yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam praktek kerja/magang ini adalah sebagai berikut

- a. Untuk memahami pengelolaan dana bergulir (bantuan perkuatan modal) di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui sistem penyaluran dan pengembalian pinjaman dana bergulir di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat.
- c. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap dunia kerja.
- d. Memberikan kemampuan untuk menggunakan pemahaman yang diperoleh di tempat magang untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan usaha setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- e. Terlatih untuk mensosialisasikan diri dengan rekan kerja dalam lingkup yang lebih luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter dan kepribadian serta disiplin ilmu yang berbeda.
- f. Dapat membandingkan bagaimana penerapan ilmu dengan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan penerapan secara nyata dalam dunia kerja.
- g. Memberikan gambaran umum lingkungan dunia kerja sehingga didapat pengalaman dan pemahaman tentang situasi dan kondisi dunia kerja sesungguhnya.
- h. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai prasyarat untuk menyelesaikan studi Keuangan Negara dan Daerah, Program Diploma III, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat yang didapat setelah melakukan kegiatan magang pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

1. Dapat mengetahui tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat.
2. Dapat mengetahui sistem dan prosedur Pengelolaan Dana Bergulir
3. Dapat memberikan Wacana dan masukan yang dapat dipertimbangkan khususnya dalam Pengelolaan Dana bergulir Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat agar dalam penyaluran dan pengembaliannya lebih baik.
4. Dapat menambah Pengetahuan dalam Bidang Akuntansi Khususnya Sistem Akuntansi Piutang serta Manajemen dan Penganggaran.

1.5 Rencana Kegiatan

Susunan rencana kegiatan selama mengikuti kuliah kerja lapangan/magang adalah sebagai berikut :

1. Membuat proposal magang
2. Mengajukan proposal magang kepada ketua program studi
3. Mengajukan surat izin magang kepada koordinator
4. Mengantarkan surat izin magang ke Instansi beserta pengambilan surat jawabnya.
5. Pelaksanaan magang :
 - a. Mengenai lingkungan kerja
 - b. Mengetahui gambaran umum Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat
 - c. Mengetahui aktivitas Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat terutama pengelolaan dana bergulir
 - d. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembangunan guna peningkatan ekonomi khususnya masyarakat kecil dan menengah.



1.6 Sistematika Laporan Magang

Secara garis besar penulisan laporan ini nantinya akan dikelompokkan atas :

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang, tujuan dan manfaat magang, tempat dan waktu magang, rencana kegiatan magang dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan tentang pendekatan teoritis yang melandasi penulisan tugas akhir, diantaranya, Pengertian Koperasi, UMKM, dan Dana Bergulir

BAB III Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat

Berisikan tentang Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM, Struktur Organisasi, Tugas pokok dan fungsi dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV Pembahasan

Berisi tentang proses pengelolaan dana bergulir dan dampak atau manfaat dana bergulir.

BAB V Penutup

Berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang bisa memberikan pertimbangan dalam pengelolaan dana bergulir pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat.

